KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Mendorong DPR sebagai Lembaga Perwakilan yang Independen
Tanggal : Kamis, 18 April 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 5

MENDORONG DPR SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN YANG INDEPENDEN

Tim Implementasi Reformasi DPR RI menyiapkan enam undang-undang baru untuk memperbaiki sistem kelembagaan dewan perwakilan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) seharusnya setelah terpilih menjadi Anggota Dewan, maka hubungannya dengan partai politik harus menjadi lebih independen karena ada suara rakyat pada dirinya. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah saat Focus Group Discussion (FGD) Peluncuran buku karya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, baru-baru ini.

Terkait independensi lembaga perwakilan itu akan dituangkan dalam undang-undang lembaga perwakilan, sehingga tidak saja orangnya tetapi kawasannya juga independen. Fahri mengatakan, saat ini Tim Implementasi Reformasi DPR RI sedang menyiapkan enam Undang-undang (UU) baru untuk memperbaiki sistem kelembagaan dewan perwakilan. Dari enam UU itu, empat di antaranya pecahan dari UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Ia menegaskan, lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah lembaga-lembaga yang besar, sehingga sudah sepatutnya memiliki aturan sendiri.

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, karena masih tergabungnya empat lembaga perwakilan dalam satu UU, sehingga cara membaca undang-undangnya pun sering tidak utuh. Makanya, sebaiknya dipisahkan, ada UU MPR, UU DPR, UU DPD, dan UU DPRD. Terlebih lagi di internal DPR RI, independensi Anggota Dewan masih sangat terikat dengan partainya.

"Kita mau mengatur keseluruhan konsep independensi lembaga perwakilan, sebab ini yang enggak ada. Harus jujur kita katakan, DPR tidak independen karena sistem hubungannya dengan partainya sangat tidak independen," kata Fahri, saat Focus Group Discussion (FGD) Peluncuran buku karya Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

"Betapa pentingnya DPR ke depan di-bikin merdeka, di-bikin lebih independen. Kami mengundang para ilmuwan untuk membicarakan konsep ini. Kita undang pakar-pakar, kita berikan drafnya, kita kasih gambaran frame besarnya. Inilah desain lembaga perwakilan kita yang sesuai dengan undang-undang dasar," ujar legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Sebelumnya, mengenai penguataan lembaga DPR RI ini pernah disampaikan Fahri saat membuka seminar *'Penguatan Kelembagaan DPR Menuju Lembaga Perwakilan Modern'*, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Desember 2018 lalu. Ia menilai, saat ini DPR masih tersandera dengan kekuatan eksekutif yang begitu kuat.

Faktanya, menurut dia,DPR belum terlalu independen. "Saya sering mengatakan dalam legislasi, kuasa eksekutif menurut saya di atas 50 persen apalagi eksekutif punya instrumen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ," kata Fahri. Dicontohkannya, dalam fungsi anggaran atau bujet, kuasa DPR atas fungsi anggaran lemah."Fungsi *budgeting* di DPR ini lemah sekali. Proposalnya dari pemerintah, begitu datang proposal itu *fix*," katanya sembari memberikan usulan untuk menjadikan DPR sebagai lembaga perwakilan yang independen.

DPR RI mengundang anggota parlemen negara-negara sahabat untuk menyaksikan langsung proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Tanah Air. Ini bagian dari upaya DPR RI dalam memperlihatkan Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia. Apalagi pada Pemilu kali ini menghadirkan sekaligus Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg).

Sementara itu dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk *Election Visit Indonesia 2019*, DPR RI mengundang parlemen berbagai negara diantaranya Turki, Malaysia, Pakistan, Rusia, dan dua organisasi internasional seperti Organisasi Konferensi Islam dan Westminster Foudation for Democracy (WFD), Inggris, dan kegiatan ini bagian dari upaya untuk melihat bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia.

"Ini adalah inisiatif DPR untuk mengundang sejumlah anggota parlemen dari beberapa negara sahabat sekaligus organisasi internasional yang selama ini dekat dan bekerja sama dengan DPR. Menyaksikan Pemilu serentak pertama di Indonesia," kata dia. ●